

Perlakuan Akuntansi Terhadap Piutang Pada Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam

Shinta Wahyu Hati 1)

Yulia Nababan 2)

Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, Batam 29461

shinta@polibatam.ac.id dan yulianavincensya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap piutang pada Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam apakah telah sesuai dengan prinsip akuntansi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi terhadap piutang pada Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam mencakup pengakuan piutang, pencatatan piutang, penilaian piutang, dan penyajian piutang belum sesuai dengan PABU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, pengakuan piutang yang dilakukan Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU). Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam hanya mengakui penggunaan tiang listrik pada saat pelunasan saja. *Kedua*, Pencatatan akuntansi terhadap piutang pada Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam tidak melakukan pencatatan jurnal pada saat piutang terjadi. *Ketiga*, Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN belum melakukan pencatatan berupa jurnal yang dibutuhkan dalam pengakuan, pencatatan dan penilaian.

Kata Kunci : Akuntansi, Piutang, Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Abstract

Research was conducted in Service of National Electricity Company Batam. The purpose of this research is to find treatment on corporate accounting business units in infrastructure pt pln batam whether it had in accordance with the principle of accounting. This study using a method of analysis of data descriptive, and this research result indicates that accounting treatment on corporate business units in infrastructure pt pln batam includes recognition of receivable, the registration of receivable, the assessment of receivable, presentation of corporate debt and not in accordance with pabu. The results of research shows that the first, recognition of receivable done business units infrastructure Service of National Electricity Company Batam not in accordance with the principle generally accepted accounting, a unit of business infrastructure pt pln batam admit only the use of electric pole at the time of the course. The second, recording on corporate accounting business units in infrastructure Service of National Electricity Company Batam not in accordance with the principle of public accounting grateful. Thirdly, Infrastructure Business Unit PT PLN has not made the recording in the form of a journal which is needed in recognition, assessment and record keeping.

Keywords; Accounting, receivable, accounting principle as common

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penjualan merupakan aktivitas yang sangat penting di perusahaan. Menurut Linda (2011), penjualan kredit adalah salah satu kegiatan yang utama dalam perusahaan, namun dalam kenyataannya

penjualan secara kredit lebih banyak diminati oleh masyarakat luas dibanding dengan penjualan tunai karena penjualan kredit dapat meringankan konsumen untuk memiliki barang yang diinginkan atau menikmati jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tanpa harus mempunyai sejumlah uang yang banyak tetapi hanya dengan memberikan uang muka, sehingga penjualan kredit dapat menarik lebih banyak

konsumen. Transaksi penjualan kredit paling sedikit melibatkan dua pihak yaitu kreditur sebagai pihak yang menjual barang atau jasa dan memperoleh piutang serta debitur pihak yang melakukan pembelian dan menjadikan hutang.

Menurut Baridwan (2004), piutang yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, dalam kegiatan normal perusahaan biasanya piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, sehingga dikelompokkan dalam aktiva lancar. Piutang merupakan unsur yang sangat penting dan memerlukan kebijakan yang baik dari manajemen dalam mengelolanya.

Salah satu perusahaan jasa yang menggunakan sistem pembayaran secara kredit adalah PT PLN Batam. PT PLN Batam merupakan perusahaan jasa penyedia layanan tenaga listrik. Perusahaan ini memiliki beberapa divisi yang menjalankan tugas masing-masing, salah satu divisi tersebut adalah Unit Bisnis Infrastruktur.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN Batam No. 094.K/DIR/2012, Unit Bisnis ini disahkan pada tanggal 24 Oktober 2012, sehingga baru berjalan kurang lebih satu tahun. Unit Bisnis Infrastruktur memiliki beberapa tugas yang salah satunya adalah mengatur transaksi jasa peminjaman tiang listrik PT PLN Batam oleh beberapa perusahaan TV kabel. Penjualan jasa layanan peminjaman tiang listrik ini dicatat sebagai piutang.

Pengelolaan penerimaan piutang oleh PT PLN Batam, pada dasarnya masih terdapat beberapa masalah. Salah satu permasalahan yang terjadi pada divisi Unit Bisnis Infrastruktur adalah adanya penunggakan pembayaran dari perusahaan TV kabel yang merupakan pelanggan dari divisi tersebut. Piutang merupakan sumber pendapatan utama pada divisi ini, sehingga piutang perlu mendapatkan perlakuan akuntansi yang tepat, dengan demikian permasalahan terkait piutang tersebut dapat diatasi secara efektif. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul “**PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PIUTANG PADA UNIT BISNIS INFRASTRUKTUR PT PLN BATAM**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap piutang Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam.
- b. Apakah perlakuan akuntansi terhadap piutang pada Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam sesuai dengan PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum).

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap piutang Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam.
- b. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi terhadap piutang pada Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam sesuai dengan PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum).

1.4. Metodologi penelitian

Objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah perlakuan akuntansi terhadap piutang pada Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam. Sedangkan data penelitian yang digunakan adalah laporan mengenai piutang pada Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu survei dan wawancara. Metode survei dilakukan dengan cara mengamati laporan atau dokumen piutang untuk memperoleh data sekunder perusahaan. Data yang digunakan adalah tahun periode 2013. Sedangkan metode wawancara dilakukan dengan cara *interview* (wawancara langsung) terhadap responden (narasumber) yang berkaitan.

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis aktual mengenai perlakuan akuntansi terhadap piutang pada perusahaan dengan membandingkan perlakuan akuntansi sesuai PABU.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Piutang

Menurut Baridwan (2004), klaim perusahaan atas uang, barang-barang atau jasa-jasa terhadap pihak-pihak lain. Dalam akuntansi pengertian tagihan biasanya digunakan untuk menunjukkan klaim yang akan di lunasi dengan uang. Menurut Kieso *et al.* (2011), piutang adalah klaim terhadap pelanggan dan lainnya untuk uang, barang, atau jasa.

Menurut PSAK nomor 1 paragraf 66 (revisi 2012), piutang dagang merupakan aset lancar yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diperkirakan untuk direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan.

2.2 Klasifikasi Piutang

Menurut Keiso *et al.* (2011), piutang dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Piutang Lancar/Piutang Jangka Pendek (*Current Receivables*)

Piutang ini diharapkan akan tertagih dalam waktu satu tahun atau selama satu siklus operasi berjalan.

b. Piutang tidak Lancar/Jangka Panjang (*Non-Current Receivables*)

Piutang yang akan tertagih dalam waktu lebih dari satu tahun atau lebih dari satu siklus operasi berjalan.

Menurut Baridwan (2004), piutang diklasifikasikan menjadi:

- a. Piutang dagang (usaha).
- b. Piutang bukan dagang.
- c. Piutang penghasilan.

2.3 Pengakuan Piutang

Menurut Kieso *et al.* (2011), dalam banyak transaksi piutang, jumlah yang diakui adalah harga pertukaran diantara kedua belah pihak. Harga pertukaran adalah jumlah yang jatuh tempo oleh debitur (pelanggan atau peminjam). Beberapa jenis dokumen bisnis, sering kali berupa faktur yang berfungsi sebagai bukti:

a. Potongan Penjualan

Harga dapat dikenakan pada saat penjualan atau berdasarkan kuantitas diskon. Perusahaan menggunakan potongan penjualan tersebut untuk menghindari terlalu sering terjadi perubahan pada katalog, untuk mengubah harga dalam jumlah yang berbeda pada saat dibeli, atau untuk menyembunyikan harga faktur yang sebenarnya dari pesaing. Diskon penjualan biasanya dikutip dalam persentase.

b. Diskon Tunai (Diskon Penjualan)

Perusahaan menawarkan diskon tunai (diskon penjualan) untuk menginduksi pembayaran cepat. Diskon tunai biasanya disajikan dalam istilah seperti 2/10, n/30 (2 persen jika dibayar dalam jangka waktu 10 hari, jatuh tempo dalam jangka waktu 30 hari), atau 10/2 EOM, net 30, EOM (2 persen jika dibayar setiap saat sebelum hari kesepuluh bulan berikutnya, dengan pembayaran penuh diterima tiga puluh hari bulan berikutnya).

Perusahaan mencatat penjualan dan transaksi diskon penjualan terkait dengan memasukkan piutang dan penjualan sebesar jumlah bruto. Perusahaan mengakui diskon penjualan hanya ketika mereka menerima pembayaran dalam periode diskon.

Menurut Sugiri dan Sumiyana (2005), piutang diakui sebagai aktiva kalau telah cukup pasti (*probable*) bahwa perusahaan akan mampu menagih piutang tersebut, sehingga kemungkinannya adalah besar bahwa diperiode mendatang akan terdapat bagian dari piutang tersebut yang kemungkinan kecil untuk dapat ditagih, maka cukuplah beralasan untuk mengurangkan piutang ragu-ragu tadi dari piutang,

sehingga piutang bersihlah yang diakui sebagai aktiva di neraca.

2.4 Penilaian Piutang

Neraca disusun setiap akhir periode maka setiap akhir tahun perlu dihitung jumlah kerugian dari piutang-piutang. Kerugian piutang ini dibebankan pada periode yang bersangkutan sehingga dapat dihubungkan antara kerugian piutang dengan penjualan-penjualan yang mengakibatkan timbulnya piutang tersebut. Pencatatan kerugian piutang sebelah debit akan dikreditkan ke rekening cadangan kerugian piutang, sehingga tidak diperlukan perubahan-perubahan dalam buku pembantu piutang.

Apabila jelas bahwa piutang sudah tidak dapat ditagih maka rekening cadangan kerugian di debit dan piutangnya dihapuskan, pada saat ini buku pembantu piutang baru di kredit. Penghapusan piutang baru dilakukan jika terdapat bukti-bukti yang jelas seperti, debiturnya bangkrut, meninggal, dan lain-lain.

Menurut Keiso *et al.* (2011), metode untuk mencatat piutang tak tertagih terbagi menjadi:

a. Metode Penghapusan Langsung (*Direct Write-Off Method for Uncollectible Accounts*)

Metode ini mencatat piutang tak tertagih dalam tahun saat ditentukan bahwa suatu piutang tertentu tidak dapat ditagih. Kerugian tersebut dicatat dengan mengkreditkan piutang usaha dan mendebit piutang tak tertagih.

b. Metode Penyisihan (*Allowance Method for Uncollectible Accounts*)

Metode ini mencatat beban atas dasar estimasi dalam periode akuntansi saat penjualan kredit dilakukan. Suatu estimasi dilakukan untuk perkiraan piutang yang tak tertagih dari semua penjualan kredit atau dari total piutang yang beredar. Estimasi tersebut dimasukkan sebagai beban dan pengurangan tak langsung dalam piutang dagang (melalui suatu kenaikan dalam perkiraan penyisihan) dalam periode saat penjualan tersebut dicatat.

2.5 Cadangan Kerugian Piutang

Menurut Kieso *et al.* (2011), metode penyisihan yang digunakan dalam menaksir jumlah piutang tak tertagih ada 2 yaitu:

a. Pendekatan Persentase Penjualan (*Percentage of Sales*)

Metode ini mencocokkan biaya dengan pendapatan, karena hal itu berkaitan dengan beban pada periode saat penjualan dicatat. Jurnal yang dibuat adalah dengan mendebit rekening piutang tak tertagih dan penyisihan piutang di kredit.

Manajemen memperkirakan berapa persen dari penjualan kredit tidak akan tertagih. Persentase ini didasarkan pada pengalaman masa lalu dan antisipasi kebijakan kredit. Perusahaan

menerapkan persentase ini baik dari total penjualan kredit atau penjualan kredit bersih tahun berjalan.

b. Pendekatan Persentase Piutang (*Percentage of Receivables*)

Pendekatan ini dengan menggunakan pengalaman masa lalu, suatu perusahaan dapat mengestimasi persentase piutang beredar yang akan menjadi tak tertagih, tanpa mengidentifikasi piutang tertentu. Prosedur ini memberikan estimasi yang cukup akurat atas nilai piutang yang dapat direalisasikan. Persentase piutang dapat diterapkan dengan menggunakan tarif gabungan yang mencerminkan estimasi piutang tak tertagih.

2.6 Penyajian Piutang di Neraca

Standar Akuntansi Keuangan paragraph 89 dan 90 (2012) menyatakan bahwa aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam perusahaan setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif transaksi semacam itu menimbulkan pengakuan beban pada laporan laba rugi.

Menurut PSAK nomor 1 (2012), suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika:

- a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam siklus operasi normal;
- b. Dimiliki untuk tujuan diperdagangkan;
- c. Diperkirakan akan terealisasi dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau Kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Siklus operasi perusahaan merupakan jangka waktu antara perolehan aset untuk pemrosesan dan realisasinya dalam bentuk kas atau setara kas. Aset lancar termasuk persediaan dan piutang dagang yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diperkirakan untuk direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan atau tanggal neraca.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlakuan Akuntansi Terhadap Piutang pada Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam

Sejak dibentuknya Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam sampai pertengahan tahun 2014 dalam perlakuan akuntansinya menggunakan metode akuntansi berbasis kas (*Cash Basis*). Namun sejak pertengahan tahun Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam mulai membenahi perlakuan akuntansi terhadap piutangnya dan mengubah metode akuntansi berbasis akrual (*Accrual Basis*).

3.1.1. Pengakuan Piutang Pemanfaatan Infrastruktur PT PLN Batam

Tidak ada pengakuan piutang di Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam. Pemakaian tiang listrik oleh pelanggan ditinjau langsung oleh tim *survey* PT PLN Batam kemudian hasilnya dilaporkan pada tanggal 28 setiap bulannya. Tim *survey* juga melaporkan apabila ada perubahan jumlah pemakaian tiang yang dilakukan oleh pelanggan. Unit Bisnis Infrastruktur hanya memasukkan data pada aplikasi Sistem Informasi Tagihan (SinTa) yang menerbitkan *invoice* setiap awal bulan. Unit Bisnis Infrastruktur mengirimkan *invoice* kepada pelanggan. *Invoice* yang telah diterima pelanggan kemudian dikembalikan lagi dan admin memasukkan tanda terima *invoice* di SinTa.

SinTa merupakan suatu sistem yang digunakan untuk membuat dan menyimpan *invoice* yang sudah diterima oleh pelanggan. Laporan yang diterima dari tim *survey* lapangan mengenai jumlah pemakaian pelanggan diberikan kepada pihak admin. Pihak admin membuat *invoice* melalui SinTa yang akan dikirimkan langsung kepada para pelanggan. Pelanggan yang telah menerima *invoice* menandatangani *invoice* yang telah diterima. *Invoice* yang telah ditandatangani oleh pelanggan akan kembali lagi kepada admin, lalu *invoice* *discan* dan dimasukkan kembali ke SinTa sebagai bukti bahwa *invoice* telah diterima oleh pelanggan.

3.1.2. Pencatatan Piutang Pemanfaatan Infrastruktur PT PLN Batam

Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam tidak melakukan pencatatan berupa jurnal, namun hanya melakukan pencatatan berupa rekap pembayaran. Pencatatan pada saat pelunasan juga dicatat langsung ke dalam rekap pembayaran. Rekap pembayaran berisi tentang informasi pembayaran dan jumlah tiang yang digunakan oleh pelanggan. Perusahaan membuat rekap pembayaran atas pembayaran setiap bulannya dari para pelanggan. Pencatatan dilakukan hanya pada rekap pembayaran yang dibuat per pelanggan pada awal bulan, dengan bukti berupa *invoice*.

Pencatatan juga dilakukan oleh divisi keuangan utama PT PLN Batam pada saat pelunasan karena Unit Bisnis Infrastruktur sendiri termasuk bagian dari perusahaan ini juga. Pelunasan oleh pelanggan dikirim langsung ke rekening utama PT PLN Batam yang diakui sebagai pendapatan. Berdasarkan data rekening utama PT PLN Batam tersebut, maka divisi keuangan utama PT PLN Batam dapat membuat jurnal atas pendapatan:

Gambar 3.1 Jurnal Atas Pendapatan

| Journal | Debit | Credit |
|---------|-------|--------|
| Cash | xxx | |
| Revenue | | xxx |

3.1.3. Penilaian Piutang Pemanfaatan Infrastruktur PT PLN Batam

Tidak ada penilaian piutang usaha pada Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam. Perjanjian kontrak antara Unit Bisnis Infrastruktur dengan pelanggannya menyatakan bahwa jangka waktu pelunasan adalah 10 hari setelah *invoice* terbit. Namun pada prakteknya masi banyak pelanggan yang melunasi kewajibannya melebihi jangka waktu 10 hari. Hal ini dikarenakan tidak ada sanksi atau denda yang diberikan kepada pelanggan atas keterlambatan pembayaran tagihan.

Pelunasan yang dilakukan oleh pelanggan diterima oleh divisi keuangan melalui rekening utama PT PLN Batam. Nilai kas yang diterima oleh divisi keuangan diakui menjadi pendapatan. Kas yang diterima dicatat oleh divisi keuangan dan diinformasikan langsung kepada admin Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam didalam informasi rekening yang digunakan pihak admin untuk melakukan pencatatan di rekap pembayaran.

Unit Bisnis Infrastruktur tidak memperhitungkan taksiran piutang yang tidak dapat tertagih sehingga perusahaan tidak memiliki cadangan kerugian piutang. Divisi ini belum dapat menghitung umur piutang karena masih berjalan sekitar satu tahun lebih. Umur piutang membutuhkan estimasi yang didasarkan dari pengalaman yang lalu.

3.1.4. Penyajian Piutang Pemanfaatan Infrastruktur PT PLN Batam

Awalnya dikarenakan Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam masih menggunakan metode *Cash Basis*, maka tidak ada penyajian piutang pada neraca. Pendapatan usaha Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam disatukan dengan pendapatan usaha PT PLN Batam secara keseluruhan dan disajikan di dalam laporan laba rugi PT PLN Batam. Pembayaran yang diberikan oleh pelanggan dicatat sebagai pendapatan usaha akun pada divisi keuangan utama PT PLN Batam.

3.2. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Perusahaan dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)

Menurut PSAK nomor 1 (2012), entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Penulis memberikan satu contoh kasus sebagai pembandingan yaitu dengan menggunakan salah satu pelanggan Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam yaitu PT Broadband. Transaksi yang digunakan adalah transaksi pada bulan Juli 2013. Kesesuaian

perlakuan akuntansi terhadap piutang pada Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) dapat dilihat di bawah ini:

3.2.1. Pengakuan Piutang

Tanggal 2 Juli Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam mengeluarkan *invoice* yang ditujukan untuk PT Broadband Rp. 17,038,000.00. Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam tidak melakukan pengakuan piutang, pada saat *invoice* diterbitkan Unit Bisnis Infrastruktur hanya memasukkan data pada aplikasi SinTa. Penggunaan tiang listrik baru akan diakui setelah pelunasan dan PT PLN Batam mengakuinya sebagai pendapatan.

Menurut Kieso *et al.* (2011), dalam banyak transaksi piutang, jumlah yang diakui adanya harga pertukaran diantara kedua belah pihak. Jumlah pemakaian tiang listrik yang digunakan oleh PT Broadband sebesar Rp. 17,038,000.00 seharusnya diakui sebagai piutang oleh Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam dan juga divisi keuangan utama PT PLN Batam pada saat *invoice* diterbitkan.

Pengakuan piutang yang dilakukan Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU). Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam hanya mengakui penggunaan tiang listrik pada saat pelunasan saja.

3.2.2. Pencatatan Piutang

Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam tidak melakukan pencatatan berupa jurnal, namun hanya melakukan pencatatan berupa rekap pembayaran. Pencatatan pada saat pelunasan juga dicatat langsung ke dalam rekap pembayaran. *Invoice* yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juli untuk PT Broadband langsung dicatat oleh Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam pada rekap pembayaran sebesar Rp. 17,038,000.00, dan melunasinya pada tanggal 30 Juli 2013. Divisi keuangan utama tidak melakukan pencatatan pada tanggal 2 Juli 2013. Pencatatan hanya dilakukan pada saat pelunasan. Jurnal yang dicatat pada saat pelunasan oleh divisi keuangan utama PT PLN Batam yaitu:

Gambar 3.2 Jurnal Atas Pendapatan pada Saat Pelunasan

| Date | Journal | Debit | Credit |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|
| 30-Jul-13 | Cash | Rp17,038,000.00 | |
| | Revenue | | Rp17,038,000.00 |

Menurut PSAK nomor 1 (2012), entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Sehingga pencatatan yang dilakukan sebaiknya menggunakan metode akuntansi berbasis akrual (*Accrual Basis*). Menurut Kieso *et al.* (2011), perusahaan mencatat penjualan sebesar penjualan

bruto dan apabila perusahaan memberikan diskon, maka perusahaan mengakui diskon penjualan hanya ketika mereka menerima pembayaran dalam periode diskon. Pelunasan piutang adalah pada saat pelanggan membayar utangnya.

Divisi keuangan utama PT PLN seharusnya melakukan pencatatan berupa jurnal untuk mengakui dan mencatat piutang PT Broadband sebesar Rp. 17,038,000.00, jurnal yang diperlukan pada tanggal 2 Juli 2013 yaitu:

| Date | Journal | Debit | Credit |
|----------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 2-Jul-13 | Account Receivable | Rp17,038,000.00 | |
| | Sales | | Rp17,038,000.00 |

Gambar 3.3 Jurnal untuk Mencatat Piutang PT Broadband

PT Broadband melakukan pelunasan pada tanggal 30 Juli 2013. PT Broadband mengirimkan uang ke rekening PT PLN Batam sebesar Rp. 17,038,000.00. Divisi keuangan utama menerima rekening Koran dari bank dan harusnya melakukan pencatatan berupa jurnal. Jurnal yang dicatat pada waktu pelunasan yaitu:

| Date | Journal | Debit | Credit |
|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 30-Jul-13 | Cash | Rp17,038,000.00 | |
| | Account Receivable | | Rp17,038,000.00 |

Gambar 3.4 Jurnal pada Saat Pelunasan Piutang PT Broadband

Pencatatan akuntansi terhadap piutang pada Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam tidak melakukan pencatatan jurnal pada saat piutang terjadi. Pencatatan rekap pembayaran sudah benar dan kedepannya dapat dijadikan buku pembantu piutang untuk piutang pada Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam kedepannya. Divisi keuangan utama PT PLN Batam juga dapat menggunakannya untuk melakukan pencatatan berkaitan dengan piutang.

3.2.3. Penilaian Piutang

Menurut Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam, diakhir periode pada bulan Desember pemakaian tiang listrik PT Broadband yang belum dibayar sebesar Rp. 78,684,000.00. PT Broadband belum melakukan pembayaran sama sekali sejak bulan September. Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam maupun divisi keuangan PT PLN Batam tidak mengakui adanya piutang dan cadangan kerugian piutang.

Menurut Kieso *et al.* (2011), piutang usaha yang disajikan dalam neraca sebesar jumlah bruto setelah dikurangkan dengan penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih. Manajemen memperkirakan berapa persen dari penjualan kredit tidak akan tertagih. Persentase ini didasarkan pada pengalaman masa lalu dan antisipasi kebijakan kredit. Perusahaan menerapkan persentase ini baik dari total penjualan kredit atau penjualan kredit bersih tahun berjalan.

Perhitungan cadangan kerugian piutang untuk piutang Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam disarankan menggunakan metode pendekatan persentase penjualan, oleh sebab itu perhitungan yang diperlukan untuk mengetahui estimasi persentase cadangan kerugian piutang pada Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam. Estimasi persentase cadangan kerugian piutang yang telah didapatkan digunakan untuk mendapatkan cadangan kerugian piutang untuk piutang PT Broadband.

Penjualan sebesar Rp. 199,598,000.00 dikali dengan estimasi persentase cadangan kerugian piutang sebesar 39,4% sehingga mendapatkan hasil estimasi beban sebesar Rp. 78,641,612.00. Estimasi beban ini akan dicatat di akhir periode untuk jurnal penyesuaian. Jurnal yang diperlukan pada saat penyesuaian adalah:

| Date | Journal | Debit | Credit |
|-----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 31-Dec-13 | Bad Debt Expense | Rp78,641,612.00 | |
| | Allowance for Doubtful Account | | Rp78,641,612.00 |

Gambar 3.5 Jurnal pada Saat Penyesuaian untuk Piutang PT Broadband

3.2.4. Penyajian Piutang

Menurut Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam penyajian pendapatan usaha dari hasil penjualan jasa sewa tiang listrik kepada PT Broadband dan beberapa pelanggan lainnya diakumulasikan oleh divisi keuangan utama PT PLN Batam dan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi PT PLN Batam.

Menurut Kieso *et al.* (2011), setelah pembenahan yang dilakukan oleh divisi Unit Bisnis PT PLN Batam dan mengganti metode akuntansi menjadi metode *Accrual Basis*. Semua penjualan kredit yang belum dilunasi pelanggan termasuk PT Broadband disajikan ke dalam neraca keuangan utama PT PLN Batam. Neraca merupakan laporan keuangan yang berisikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari suatu perusahaan dalam satu periode. Penyajian piutang di neraca sebesar jumlah yang diharapkan dapat direalisasikan, yaitu piutang usaha bersih dan pengurang pencadangan piutang tidak tertagih.

Penyajian piutang Unit Bisnis Infrastruktur disajikan di neraca keuangan utama PT PLN Batam.

Piutang Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam dicatat sebagai piutang lain-lain dikarenakan piutang usaha PT PLN Batam hanya mencakup penjualan listrik saja. Cadangan kerugian piutang piutang bisa disajikan di dalam penyisihan piutang ragu-ragu pada neraca PT PLN Batam.

PT PLN Batam belum ada piutang yang disajikan untuk usaha pemakaian tiang listrik pada Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam. Namun berdasarkan neraca yang telah dibuat di PT PLN Batam pada tahun 2012, piutang dapat dimasukkan dalam akun piutang lain-lain setelah adanya pengakuan piutang pada Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam tersebut. Cadangan kerugian piutang juga dapat dimasukkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai.

4. Kesimpulan

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejak dibentuknya Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam sampai pertengahan tahun 2014 dalam perlakuan akuntansinya menggunakan metode akuntansi berbasis kas (*Cash Basis*). Namun sejak pertengahan tahun Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam mulai membenahi perlakuan akuntansi terhadap piutangnya dan mengubah metode akuntansi berbasis akrual (*Accrual Basis*). Perlakuan akuntansi yang dibahas pada penelitian ini terdiri atas pengakuan piutang, pencatatan piutang, penilaian piutang pemanfaatan piutang, dan penyajian pada neraca terhadap piutang pada Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam.
2. Tidak ada pengakuan piutang di Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam. Unit Bisnis Infrastruktur hanya memasukkan data pada aplikasi Sistem Informasi Tagihan (SinTa) yang menerbitkan *invoice* setiap awal bulan. *Invoice* yang telah diterima pelanggan kemudian dikembalikan lagi dan admin memasukkan tanda terima *invoice* di SinTa. Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam tidak melakukan pencatatan berupa jurnal, namun hanya melakukan pencatatan berupa rekap pembayaran. Pencatatan pada saat pelunasan juga dicatat langsung ke dalam rekap pembayaran. Pencatatan juga dilakukan oleh divisi keuangan utama PT PLN Batam pada saat pelunasan yang diakui sebagai pendapatan. Tidak ada penilaian piutang usaha pada Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam. Perjanjian kontrak antara Unit Bisnis

Infrastruktur dengan pelanggannya menyatakan bahwa jangka waktu pelunasan adalah 10 hari setelah *invoice* terbit. Namun pada prakteknya masi banyak pelanggan yang melunasi kewajibannya melebihi jangka waktu 10 hari. Hal ini karena tidak ada sanksi atau denda yang diberikan kepada pelanggan atas keterlambatan pembayaran tagihan. Pelunasan yang dilakukan oleh pelanggan diterima oleh divisi keuangan melalui rekening utama PT PLN Batam. Nilai kas yang diterima oleh divisi keuangan diakui menjadi pendapatan. Awalnya dikarenakan Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam masih menggunakan metode *Cash Basis*, maka tidak ada penyajian piutang pada neraca. Pendapatan usaha Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam disatukan dengan pendapatan usaha PT PLN Batam secara keseluruhan dan disajikan di dalam laporan laba rugi PT PLN Batam.

3. Perlakuan akuntansi terhadap piutang berupa pengakuan, pencatatan, penilaian, dan penyajian piutang belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN belum melakukan pencatatan berupa jurnal yang dibutuhkan dalam pengakuan, pencatatan dan penilaian. Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN tidak memiliki Neraca yang dibutuhkan untuk laporan keuangan.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adalah sebagai berikut:

- a. Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam belum menerapkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) dengan baik terkait dari pengakuan piutang, pencatatan piutang, penilaian piutang, dan penyajian piutang. Sebaiknya perusahaan menerapkan PABU dengan baik mengingat PT PLN Batam merupakan perusahaan yang akuntabilitasnya transparan dan terbuka untuk masyarakat kota Batam.
- b. Metode *cash basis* yang digunakan oleh Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam sebaiknya diganti dengan metode yang disarankan oleh PSAK yaitu *accrual basis*.
- c. Rekap pembayaran yang dibuat oleh Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam sudah bagus dan kedepannya dapat digunakan sebagai buku pembantu piutang divisi ini.
- d. Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam memerlukan adanya perhitungan cadangan kerugian piutang. Mengingat divisi ini baru

berjalan sekitar satu tahun lebih sehingga sebaiknya menggunakan cadangan kerugian dengan metode pendekatan persentase penjualan.

- e. Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam perlu memberikan sanksi atau denda untuk para pelanggan yang piutangnya melewati batas jatuh tempo yang sudah diatur agar jumlah piutang tak tertagih tidak terlalu besar.

Daftar Referensi

- [1] Baridwan, Z. (2004). *Intermediate Accounting* (delapan ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Indonesia, I. A. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, Weygandt, & Warfield. (2011). *Intermediate Accounting* (IFRS ed., Vol. I). New Jersey: John Wiley & Sons.
- Linda, L. (2011). *Sistem Akuntansi Pencatatan Piutang. Tugas Akhir*.
- PLN, S. K. (2012). *094.K/DIR/2012*. Batam: Direktur PT PLN Batam.
- Sugiri, S., & Sumiya. (2005). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen perusahaan YKPN